

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2017



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UMKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2015-2019. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2018

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE. M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumberdaya Manusia	5
1.1.3 Struktur Organisasi	6
1.2 Maksud anTujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 RuangLingkup	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019	8
2.1 Visi dan Misi	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Tujuan	10
3.2 Program dan Kegiatan	12
3.3 Evaluasi Rencana Aksi	14
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI	39



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM;
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- f. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
- g. UPTD Badiklatkop dan UMKM;
- h. UPTD Perkuatan Modal KUMKM;
- i. UPTD PLUT;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :



- ❖ Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
 - ❖ Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
 - ❖ Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
 - ❖ Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
 - ❖ pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
 - ❖ penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ **Sekretariat**
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan KUMKM;
 - 2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana KUMKM;
 - 3) Seksi Data dan Informasi KUMKM;
- b. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha KUMKM;
 - 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha KUMKM;
 - 3) Seksi Aneka Usaha KUMKM;
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Jasa dan Keuangan;
 - 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, membawahi :



- 1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan KUMKM;
 - 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
- e. UPTD Badiklatkop dan UMKM, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD Perkuatan Modal KUMKM, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Teknis Operasional;
- g. UPTD PLUT, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;

1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1berikut :

Tabel. 1.1.2.1Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

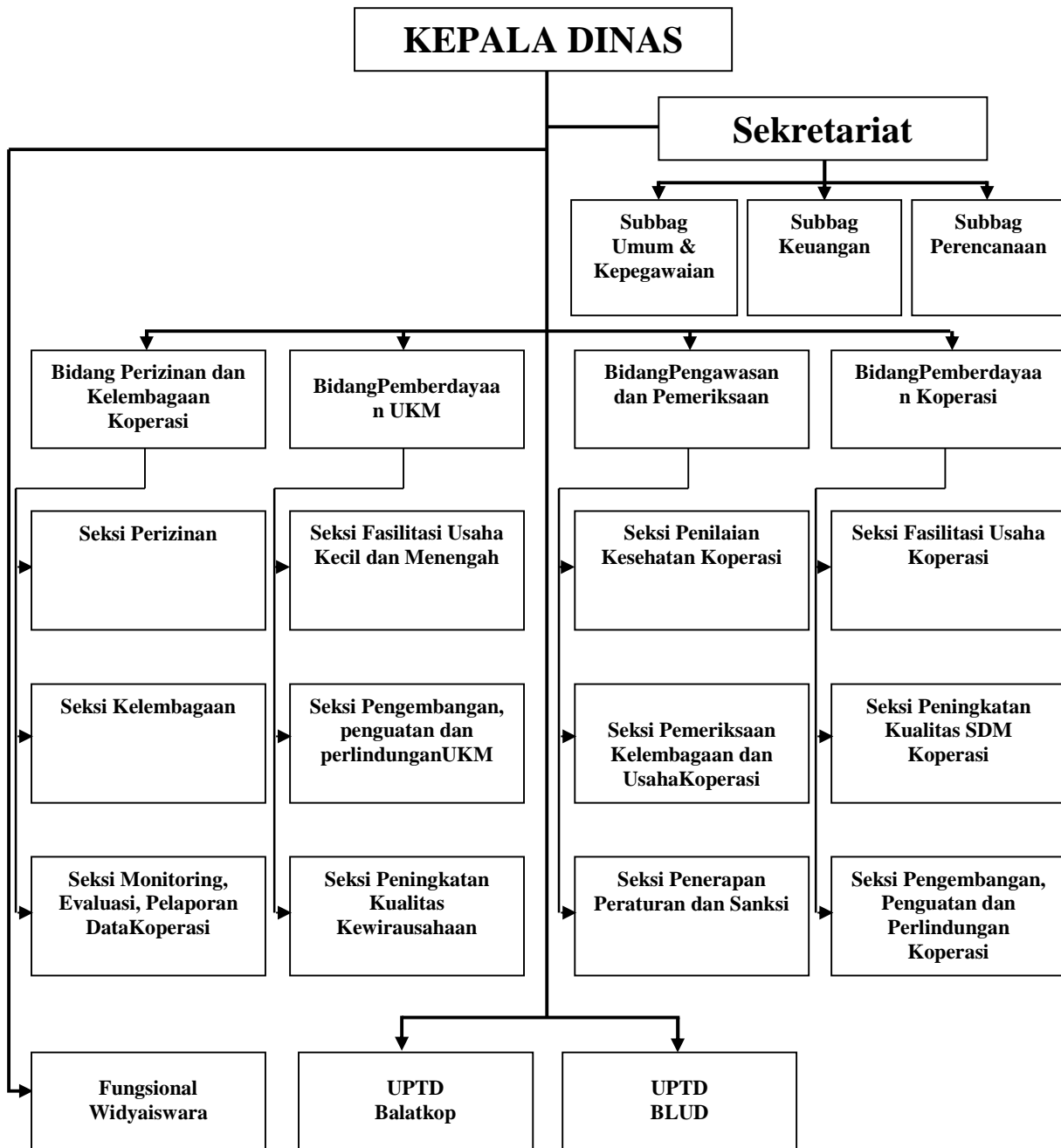
JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 115	S3 : 1	IV/d : 0	Ess IV = 21	Widya Iswara. =3 org
PTHI : 8	S2 : 13	IV/c : 2	Ess III = 7	
	S1 : 56	IV/b : 8	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 7		
	D3 : 8	III/d : 41		
	D2 : -	III/c : 13		
	D1 : -	III/b : 26		
	SLTA : 33	III/a : 3		
	SLTP : 5	II/d : 5		
	SD : 1	II/c : 3		
		II/b : 1		
		II/a : 6		



		I/d : 0		
		I/c : 1		
		I/b : 1		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 115	PNS : 117		

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKMadalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017.



BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi



yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKMProvinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)	SATUAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	20%	Persen
		2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	5%	Persen
		3	Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	1,2%	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	450%	Persen
		2	Jumlah UMKM	98.253	Unit
		3	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	150%	Persen







Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
			1	2	3	4	5	
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	5%	10%	13%	16%	20%	Persen
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector koperasi	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5%	Persen
3.	Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,4%	0,6%	0,8%	1,0%	1,2%	Persen
4.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	4 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	50%	100%	200%	350%	450%	Persen
5.	Meningkatnya jumlah UMKM yang dibina	5 Jumlah UMKM	60.563	94.185	96.011	97.122	98.253	Unit
6.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	6 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	15%	50%	75%	100%	150%	Persen







3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 10 program dengan 43 kegiatan pada tahun 2017, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- l. Pameran dan Promosi Pembangunan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Penyusunan laporan Keuangan
- b. Penyusunan data kepegawaian
- c. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan
- d. Penyusunan Program dan Laporan Capaian Kinerja
- e. Penyusunan data dan informasi



5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- A. Penialain kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS
- B. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM
- C. Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota
- D. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit
- E. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri
- F. Pendataan dan pembinaan KUMKM
- G. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)

6) Program Peningkatan Pelayanan BLUD/UPTD Perkuatan Permodalan

- a. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD
- b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD
- c. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon/penerima dana bergulir BLUD

7) Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

- a. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur
- b. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian
- c. Rakor penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
- b. Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi
- c. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- d. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- e. Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi

10) Program Perencanaan pembangunan daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



3.3 EVALUASI RENCANA AKSI

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2017. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2017 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2017 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2017

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Admistrasi Perkantoran	92	92,07	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	94,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	79,53	Sangat Tinggi	Tinggi
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,22	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	100	98,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	95	66,61	Sangat Tinggi	Sedang
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100	92,35	Sangat Tinggi	Tinggi
8	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100	98,57	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan	100	98,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	98,15	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	RATA-RATA JUMLAH	95,30	89,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dari 10 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program



Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebesar 66,61 persen dari total anggaran pada program ini sebesar Rp. 1.459.381.695,-. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan yang mencapai 98,82 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2017

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02.11.15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM			2.191.080.000		1.459.381.695	95	67
1	02.11.15.003	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	Jumlah KSP/USP dan KJKS/UJKS yang dinilai kesehatannya	25	61.990.000	25	61.953.000	100	100
2	02.11.15.010	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	Jumlah peserta rapat Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	30	150.000.000	30	149.006.320	100	99
3	02.11.15.014	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	Jumlah temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	1	100.000.000	1	99.936.000	100	100
4	02.11.15.015	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang termonitoring dan terevaluasi	50	50.000.000	50	49.891.000	100	100
5	02.11.15.020	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	Jumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaan USPnya	10	96.250.000	10	96.082.000	100	100
6	02.11.15.025	Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	Jumlah Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	5	807.840.000	5	651.577.896	100	81
7	02.11.15.027	Pendataan dan pembinaan pembinaan KUMKN	jumlah Pendataan dan pembinaan KUMKM	2	600.000.000	1	29.704.000	50	5
8	02.11.15.033	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	2	75.000.000	2	75.000.000	100	100
9	02.11.15.035	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah pendampingan pusat layanan usaha terpadu	1	150.000.000	1	146.731.479	100	98



No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			(PLUT)						
10	02.11.15.048	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	10	100.000.000	10	99.500.000	100	100
02	02.11.16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM			884.019.000		816.348.400	100	92
1	02.11.16.001	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	12	600.000.000	12	532.599.400	100	89
2	02.11.16.004	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	jumlah KUMKM yang termonitor dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUDnya	140	100.000.000	140	99.755.000	100	100
3	02.11.16.005	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	90	184.019.000	90	183.994.000	100	100
03	02.11.19	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi			2.000.000.000		1.971.316.499	100	99
1	02.11.19.016	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	521	2.000.000.000	521	1.971.316.499	100	99
04	02.11.20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan			383.223.000		378.707.600	100	99
1	02.11.20.009	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	jumlah peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	65	267.925.000	65	264.543.000	100	99
2	02.11.20.011	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	Jumlah peserta Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	30	62.458.000	30	61.504.600	100	98
3	02.11.20.012	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	Jumlah peserta Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	30	52.840.000	30	52.660.000	100	100
05	02.11.21	Program Peningkatan dan Pengembangan			934.982.000		917.682.000	100	98



No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Kelembagaan Koperasi dan UMKM							
1	02.11.21.001	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	2	127.062.000	2	122.853.200	100	97
2	02.11.21.002	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15	313.320.000	15	307.186.000	100	98
3	02.11.21.003	Workshop Revitalisasi Koperasi		50	100.000.000	50	98.030.000	100	98
4	02.11.21.014	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15	94.600.000	15	94.540.000	100	100
5	02.11.21.047	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	Jumlah Peserta pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	50	100.000.000	50	97.901.000	100	98
6	02.11.21.048	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi	60	100.000.000	60	97.201.800	100	97
7	02.11.21.049	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	jumlah peserta Diklat Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	40	100.000.000	40	99.970.000	100	100
06	05.04.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.113.000.000		1.024.784.374	92	92
1	05.04.15.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	12	2.000.000	0	0	0	0
2	05.04.15.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan penyediaan rekening telepon, air dan listrik	12	225.000.000	12	154.213.050	100	69
3	05.04.15.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	340.600.000	12	339.800.000	100	100
4	05.04.15.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	110.000.000	12	109.850.000	100	100
5	05.04.15.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12	18.000.000	12	18.000.000	100	100
6	05.04.15.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100



No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			n bangunan kantor						
7	05.04.15.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah penyediaan peralatan rumahtangga	1	40.000.000	1	39.000.000	100	98
8	05.04.15.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	16.000.000	3	12.388.000	100	77
9	05.04.15.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
10	05.04.15.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10	177.900.000	10	177.645.324	100	100
11	05.04.15.022	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18	78.500.000	18	77.888.000	100	99
12	05.04.15.029	Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan	1	80.000.000	1	71.000.000	100	89
07	05.04.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.446.409.000		1.369.248.198	100	95
1	05.04.16.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	1.034.600.000	1	1.007.734.200	100	97
2	05.04.16.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1	265.734.000	1	259.684.000	100	98
3	05.04.16.018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	15.000.000	12	14.780.000	100	99
4	05.04.16.020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	121.075.000	12	77.049.998	100	64
5	05.04.16.024	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
08	05.04.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			120.000.000		95.440.000	100	80
1	05.04.19.026	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi	12	120.000.000	12	95.440.000	100	80
09	05.04.20	Program			405.706.000		402.532.500	100	99



No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan							
1	05.04.20.001	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan Keuangan	13	44.000.000	13	43.964.000	100	100
2	05.04.20.022	Penyusunan data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang disusun	12	122.400.000	12	122.400.000	100	100
3	05.04.20.035	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Jumlah pembiayaan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	12	102.306.000	12	101.106.000	100	99
4	05.04.20.069	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	10	85.000.000	10	84.312.500	100	99
5	05.04.20.077	Peningkatan Data dan Informasi	jumlah pembiayaan Peningkatan Data dan Informasi	12	52.000.000	12	50.750.000	100	98
10	05.04.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1	230.600.000	1	227.801.300	100	99
1	05.04.25.025	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah rapat Musrenbang SKPD	1	230.600.000	1	227.801.300	100	99
			JUMLAH	1	9.709.019.000	1	8.663.242.566	99	89

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2017 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 sudah seluruhnya mencapai 100 persen kecuali pada program administrasi perkantoran yang hanya 92 persen. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya kesalahan penyusunan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan umkm yang kinerjanya 95 persen hal ini dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaran yang menyebabkan kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan.



Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2017 sebesar 89,23 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.709.019.000,-. Hal ini berarti ada 10,77 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 atau sebesar Rp. 1.045.776.434,- yang tidak terserap. Serapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pendataan dan pembinaan KUMKM yang hanya sebesar 4,95 persen. Hal ini dikarenakan karena adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Selain itu serapan anggaran yang tidak terlalu tinggi juga ada pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya sebesar 68,54 persen. Hal ini dikarenakan penggunaan air listrik dan telepon yang memang tidak terlalu besar.

Secara rinci masing-masing realisasi kegiatan yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 2.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 0,- dan tidak dilaksanakan dikarenakan terkena rasionalisasi.
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 225.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 154.213.050,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 340.600.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 339.800.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.



4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 110.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 109.850.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 18.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 18.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 15.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
7. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 40.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 39.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan, dengan biaya Rp. 16.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 12.388.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen
9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 10.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 177.900.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 10 kali. Terealisasi Rp. 177.645.324,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.



11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 78.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target 18 kali. Terealisasi Rp. 77.888.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 12. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang di ikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 71.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 kegiatan yaitu:
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 1.034.600.000,00,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 1.007.734.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 265.734.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 259.684.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 121.075.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 77.049.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerja adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target 12 bulan. Terealisasi Rp. 14.780.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 10.000.000,-. Indikatornya adalah Jumlah pembiayaan



pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan yaitu :
 1. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi dengan target 40 orang. Terealisasi Rp. 95.440.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 5 kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 44.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target 13 dokumen. Terealisasi Rp. 43.964.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 122.400.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data kepegawaian target 12 bulan. Terealisasi Rp. 122.400.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, dengan biaya Rp. 102.306.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen
 4. Penyusunan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dengan target 10 dokumen. Terealisasi Rp. 84.312.500,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.



5. Peningkatan data dan informasi, dengan biaya Rp. 52.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data dan informasi dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 50.750.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan musrenbang SKPD dengan biaya Rp. 230.600.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan musrenbang dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 227.801.300,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM dengan 10 kegiatan yaitu :
1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS dengan biaya Rp. 61.990.000,-. Indikatornya adalah jumlah penilaian terhadap koperasi di Kabupaten/Kota dengan target 25 koperasi. Terealisasi Rp. 61.953.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM dengan biaya Rp. 150.000.000,-. Indikatornya adalah jumlah UKM yang memperoleh Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp. 149.006.320,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Temu konsultasi pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dengan target 70 UKM. Terealisasi Rp . 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 4. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota dengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang



- termonitoring dan terevaluasi dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 49.891.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
5. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit dengan biaya Rp. 96.250.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaan USPnya dengan target 10 koperasi. Terealisasi Rp. 96.082.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 6. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri dengan biaya Rp. 807.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri dengan target 5 kali. Terealisasi Rp. 651.577.896,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 7. Pendataan dan pembinaan KUMKN dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pendataan dan pembinaan KUMKM dengan target 2 kegiatan. Terealisasi Rp. 29.704.000 dan terlaksana sebesar 50 persen. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lampung.
 8. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah dengan biaya Rp. 75.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan dan promosi Produk-produk unggulan daerah adalah 1 event. Terealisasi Rp. 75.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 9. Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biaya Rp.150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pendampingan bagi KUMKM se-Provinsi Lampung dengan target 250 orang. Terealisasi Rp. 146.731.479,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 10. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biaya Rp.100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan target 10



orang. Terealisasi Rp. 99.500.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan 3 kegiatan yaitu :
1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 532.599.400,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kumkm yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD dengan target 140 kumkm. Terealisasi Rp. 99.755.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLU, dengan biaya Rp. 184.019.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD dengan target 90 orang. Terealisasi Rp. 183.994.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan target 521 orang. Terealisasi Rp. 1.971.316.499,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kabupate Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mendukung kegiatan



tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebelumnya telah merekrut Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang ditempatkan di 15 Kabupaten/Kota.

- 9) Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan dengan 3 kegiatan yaitu :
1. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur, dengan biaya Rp. 267.925.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur dengan target 65 orang. Terealisasi Rp. 264.543.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 2. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian, dengan biaya Rp. 62.458.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 61.504.600,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 3. Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP, dengan biaya Rp. 52.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 52.660.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
- 10) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 7 kegiatan yaitu :
2. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi, dengan Biaya Rp. 127.062.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dengan target 2 kegiatan. Terealisasi



- Rp. 122.853.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, maka dilaksanakan penilaian atas kinerja koperasi di Provinsi Lampung, untuk kemudian diberikan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPS Wijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin (Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika (Lampura), Primkopal Kimal Lampung (Lampura), PRIMKOPPOLRES Lampung (Lamsel), KPN Talang Padang (Tanggamus)
3. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 313.320.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 307.186.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Kegiatan ini mengupdate data jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Lampung melalui *Online Data Sistem*.
 4. Workshop Revitalisasi Koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Penyuluhan bagi Anggota Koperasi dengan target 90 orang. Terealisasi Rp. 98.030.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 94.600.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah monitoring dan evaluasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 94.540.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen
 6. Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator



kinerjanya adalah Jumlah pengurus koperasi yang lebih memahami tentang pengawasan kelembagaan koperasi dengan target 50 orang. Terealisasi Rp. 97.901.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

7. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi target 60 koperasi. Terealisasi Rp. 97.201.800,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
8. Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dengan target 40 orang. Terealisasi Rp. 99.970.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2017

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2017	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	13 %	17,91 %
		2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi	2 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor koperasi	4,0 %	6,16 %
		3. Meningkatkan tata kelola kinerja koperasi yang profesional	3 Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi	0,8 %	-4,58 %



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2017	REALISASI
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	200 %	320 %
		2. Meningkatnya jumlah UKM yang dibina	2 Jumlah UMKM	96.011	99.307
		3. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	75 %	108,33 %

Melihat dari persentase capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung nampak cukup baik, hal ini terlihat dari indikator kinerja sasaran yang sudah banyak melebihi target.

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2017 sebanyak 5.325 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 205 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2016 sebanyak 5.120 unit. Dari total koperasi yang ada sejumlah 5.325 unit Koperasi, terdiri dari 3.1221 (58,61 %) Koperasi yang aktif dan 2.204 (41,39 %) Koperasi yang tidak aktif. Bila dibandingkan dengan awal periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 17,64 persen dari target yang di pasang sebesar 13 persen pada tahun 2017. Adapun target yang blm tercapai seperti pertumbuhan jumlah volume usaha koperasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Mengingat data yang diperoleh bersumber dari Online Data Sistem (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI dan sampai saat ini sedang ada perbaikan data untuk meningkatkan kualitas data dikarenakan



banyak kesalahan pengiputan data koperasi misalnya double input dan kesalahan input lain yang dilakukan oleh beberapa provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

- ❖ Pada tahun 2017 ini Kementerian Koperasi dan UKM RI membubarkan koperasi yang tidak aktif yang berakibat pada turunnya volume usaha koperasi dan data terkait lainnya yang ada pada data ODS dan hal ini juga berpengaruh pada data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Dengan perbaikan data itu diharapkan adanya jumlah koperasi real, merupakan koperasi yang berkualitas yang dimungkinkan tumbuh lebih mudah sekaligus mudah diawasi dan dibina, dengan anggota dan volume usahanya yang ditingkatkan. Pertimbangannya adalah untuk menciptakan system koperasi yang sehat demi tercapainya koperasi yang tangguh dan mandiri. Jumlah UMKM yang dibina sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 99.307 unit dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 96.158 unit. Sedangkan untuk pertumbuhan wirausaha baru yaitu sebesar 320 % dan Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten naik sebesar 108,33 % dibanding pada awal periode Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2014.

Dari uraian diatas, capaian kinerja yang sudah lebih baik dibanding tahun 2017. Namun untuk mencapai target sasaran utama strategis pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2015-2019, masih dibutuhkan anggaran yang memadai terutama untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi yang aktif serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Beberapa upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang telah dilakukan selama Tahun 2017 antara lain :

- a. Pembiayaan Koperasi dan UMKM, melalui upaya:
 - 1) Dana bergulir BLUD; Pada tahun 2017 telah terealisasi penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 umkm.



Perkembangan realiasi dana bergulir BLUD sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.4. Realiasi Dana Bergulir BLUD s/d Tahun 2017

NO.	KAB/KOTA	REALISASI DANA BERGULIR							
		TOTAL S/D TH 2014		TOTAL TH 2015		TOTAL TAHUN 2016		TOTAL TAHUN 2017	
		JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)
1	Bandar Lampung	370	7.707.500	37	875.000	24	645.000	33	985.000
2	Metro	98	2.119.000	4	140.000	10	370.000	2	40.000
3	Lamsel	220	4.570.000	24	620.000	23	710.000	46	910.000
4	Lampung Tengah	207	4.427.000	11	350.000	20	645.000	12	255.000
5	Lampung Utara	139	2.995.000	4	185.000	8	305.000	5	130.000
6	Lampung Barat	141	3.149.000	4	180.000	4	170.000	4	190.000
7	Tanggamus	42	1.025.000	1	15.000	1	20.000	2	40.000
8	Tulang Bawang	82	1.425.000	16	360.000	6	155.000	28	760.000
9	Lampung Timur	161	3.247.500	4	145.000	5	175.000	2	100.000
10	Pesawaran	87	1.754.000	2	65.000	4	110.000	3	90.000
11	Way Kanan	122	2.850.000	1	50.000	2	100.000	3	90.000
12	Pringsewu	167	3.765.000	14	360.000	9	320.000	7	40.000
13	Mesuji	56	849.500	21	410.000	7	225.000	4	165.000
14	T. Bawang Barat	85	1.657.500	3	100.000	7	160.000	7	105.000
15	Pesisir Barat	29	689.000	0	0	4	100.000	1	40.000
	JUMLAH	2.006	42.230.500	146	3.855.000	134	4.210.000	159	4.105.000

Sumber : UPTD BLUD Perkuatan Modal KUKM Provinsi Lampung

Realisasi Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 42.230.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.006 UMKM, pada tahun 2015 penyaluran sebesar Rp 3.855.000.000,- kepada 146 UMKM sedangkan penyaluran tahun 2016 meningkat 9,2 % sebesar Rp 4.210.000.000,-. Pada tahun 2017 BLUD KUMKM Perkuatan Modal Provinsi Lampung menyalurkan Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 UMKM yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD sebanyak 2.445 UMKM bertambah sebanyak 439 UMKM atau 22% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.006 UMKM.



Total penyaluran Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 54.400.500.000,- yang di dsitribusikan kepada 2.445 KUMKM atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.170.000.000,- atau 28,81 % dari tahun 2014.

- 2) Penandatanganan MOU dengan LPDB untuk lebih meningkatkan penyaluran bantuan permodalan bagi KUMKM yang ada di Provinsi Lampung.
- 3) Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang sudah ada perda dan menunggu penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui upaya:

- 1) Pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Provinsi Lampung
- 2) Pameran dan Promosi produk-produk unggulan KUMKM
- 3) Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi.
Adapun penghargaan yang diberikan adalah :

- a) Peresmian gedung dan pengoperasian PLUT KUMKM Provinsi Lampung
- b) Bantuan pembiayaan dana bergulir dari UPTD Perkuatan Permodalan
- c) Peluncuran Program Kampung Digital bekerjasama dengan PT. Telkom
- d) Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT Mitra Ummat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPS Wijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin (Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika (Lampura), Primkopal Kimal Lampung



(Lampura), PRIMKOPPOLRES Lampung (Lamsel), KPN Talang
Padang (Tanggamus)

c. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM Melalui Diklat-Diklat dan
Pelatihan Yang Berkesinambungan. Pelatihan itu antara lain :

- 1) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Manager/Kepala Cabang Koperasi
- 2) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Juru Buku
- 3) Pelatihan Kewirusahaan Berbasis Sumber Daya Lokal Dibidang Hasil Laut di Kabupaten Lampung Timur
- 4) Pelatihan Website dan Internet Marketing Bagi KUMKM
- 5) Pelatihan Menejemen Pemasaran Produk UKM
- 6) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kasir Koperasi
- 7) Pelatihan Menejemen Perkoperasian di Kota Metro
- 8) Pelatihan Kewirausahaan Bagi KUMKM Usaha Kopi Bubuk di Kabupaten Lampung Barat
- 9) Pelatihan Administasi Pembukuan Bagi Koperasi Baru
- 10)Pelatihan Kewirausahaan Bidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat
- 11)Pelatihan Kerirausahaan Bidang Informal (Produk Makanan Dan Aneka Jasa) di Kabupaten Lampung Selatan
- 12)Pelatihan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pelaksanaan RAT
- 13)Pelatihan Sertifikasi Bagi Marketing
- 14)Pelatihan Menejemen Usaha Kecil Bagi KUMKM
- 15)Pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
- 16)Bimtek Bagi Tenaga Pendamping
- 17)Diklat Perkuatan Modal Usaha Bagi UMKM Calon / Penerima Dana Bergulir BLUD
- 18)Diklat Dan Uji Kompetensi Bagi Fasilitator (Pembina KUMKM)
- 19)Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Aparatur Yang Membidangi Koperasi Dan Umkm



- 20) Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam
- 21) Diklat Dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi (Diklat Bagi Pengelola Koperasi Yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

\



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2017 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu *“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”*.

Bandar Lampung, Januari 2018

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG,**

SATRIA ALAM, S.E., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307198603 1007



LAMPIRAN

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI

TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN				Realisasi Pelaksanaan					
									1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
				Rakor penyusunan program dan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	Rakor penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	30 koperasi	52,840,000	52,660,000										
				Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya	75 KUMKM	934,982,000	917,682,000										
				Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	1 Event	127,062,000	122,853,200										
				Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15 Kali	313,320,000	307,186,000										
				Workshop revitalisasi koperasi	Jumlah Workshop revitalisasi koperasi	15 Kali	100,000,000	98,030,000										
				Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15 Kali	94,600,000	94,540,000										
				Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	Jumlah Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	60 Orang	100,000,000	97,901,000										
				Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	60 Orang	100,000,000	97,201,800										
				Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi	Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi	30 Orang	100,000,000	99,970,000										
							9,709,019,000	8,663,242,566										

BANDAR LAMPUNG, Januari 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007